BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Pemalsuan Sertifikat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat KUHP Membuat surat palsu adalah membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Surat palsunya atau tidak benar surat terletak pada asal atau si pembuat. Pelaku Pemalsuan Sertifikat juga dapat dijerat Pasal 264 ayat (1) karena dapat merugikan, Untuk mencegah pemalsuan sertifikat tanah atau bangunan, maka pemilik tanah harus lebih waspada dan lebih hati-hati. Pemilik tanah tidak diperbolehkan, memberikan sertifikat asli atau fotocopy sertifikat kepada pihak lain dengan alasan apa pun, kecuali kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris. Dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sudah ada sanksi dan hukuman yang tegas seperti yang sudah diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 263 dan 264 KUHP. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang adalah untuk melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi.¹

Selain itu diharapkan dengan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang agar dapat memberikan kontribusi pada

¹ Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya, Farhan Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah," Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra vol. 1 No. 1, April 2023, Hlm.12-14

pengembangan dan penerapan keilmuan kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat yang diperoleh adalah dengan bertambahnya keilmuan dan pengetahuan bagi staf kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengetahui kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat dan agar lebih waspada untuk menghadapi oknum dalam hal pemalsuan sertifikat tanah.

Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secaramateriil yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud yang jelas yakni menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan dalam suatu tulisan:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvodige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) (Pasal 266)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Pemalsuan Materiil : Adalah suatu benda, tanda, merek mata uang atau suatu tulisan dipandang sebagai telah dipalsukan secara materiil atau *materieellst vervalst*, jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah diubah demikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli. Palsunya surat bukan terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.

Pengertian tindak pidana pemalsuan dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Apabila seseorang yang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan oleh pejabat yang lalai atau

sengaja melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara. Demikian pula adanya tindakan yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai tindak pidana kewarganegaraan Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan pidana :” penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu’ pidana (*straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel.1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	No.16/pid.B /2021/PN. Srl	Idrus Bin Aman	<p>Kesatu: Primair Pasal 266 ayat 1 (satu) KUHP Subsidaair: Pasal 266 ayat 2 (dua) KUHP</p> <p>Kedua : Primair Pasal 263 ayat 1 (satu) KUHP subsidaair : Pasal 263 ayat 2 (dua)</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Idrus Bin Aman (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Bin Aman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Aprizal tertanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Idrus mengaku sebagai Kepala Desa Muara Danau.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara H. M. Arpan, Dkk (selaku penjual) dengan sdr. Aprizal (sebagai pembeli)</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Idrus Bin Aman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan kedua primer Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Afrizal tertanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Idrus mengaku sebagai</p>	Incrach

				<p>tertanggal 21 Maret 2012;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi serah terima uang sebesar Rp. 80.600.000 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Aprizal kepada H. M. Arpan tertanggal 26 Maret 2012 untuk pembayaran jual beli tanah terletak di Desa Muara Danau Kec. Pelawan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Aprizal tertanggal 03 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Idrus mengaku sebagai Kepala Desa Muara Danau. Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Kepala Desa Muara Danau;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara H. M. Arpan, Dkk (selaku penjual) dengan sdr. Afrizal (sebagai pembeli) tertanggal 21 Maret 2012</p> <p>c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi serah terima uang sebesar Rp. 80.600.000 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Afrizal kepada H. M. Arpan tertanggal 26 Maret 2012 untuk pembayaran jual beli tanah terletak di Desa Muara Danau Kec. Pelawan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Afrizal tertanggal 03 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Idrus mengaku sebagai Kepala Desa Muara Danau; Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).</p>	
2.	No.50/Pid.B	Badrudin	Kesatu: Pasal	1. Menyatakan Terdakwa Badrudin terbukti	Mengadili	Incrach

	/2021/PN. Pal		266 ayat 1 (satu) KUHP Kedua : Pasal 266 Ayat 2 (dua) KUHP	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Badrudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama Nicolaus Salama yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Budi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. BUDI kepada Sdra. Badrudin bermaterai</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Badrudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama Nicolaus Salama yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama BUDI yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;</p>	
--	------------------	--	--	---	--	--

				<p>6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;</p> <p>d. 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya. Terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. Budi kepada Sdra. Badrudin bermaterai 6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;</p> <p>d. 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya. Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
3.	No. 61/ Pid. B/2023/ PN. Pal	H. Abd Rauf Alias H. Raupong	<p>Kesatu : Pasal 263 ayat 1 (satu) KUHP</p> <p>Kedua : Pasal 263 ayat 2 (dua) KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 266 ayat 1 (satu) KUHP</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.</p>	Incrach

			Keempat: Pasal 266 ayat 2 (dua) KUHP	<p>palsu, diancam jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan.</p> <p>3. Menetapkan Barang bukti berupa :</p> <p>a. Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).</p> <p>b. Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).</p> <p>c. Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).</p> <p>d. Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).</p> <p>e. Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli).</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tetap dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli)</p> <p>b. Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).</p> <p>c. Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).</p> <p>d. Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli)</p> <p>e. Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli)</p> <p>f. 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan</p>	
--	--	--	--------------------------------------	---	--	--

				<p>f. 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009. Dikembalikan Kepada Agusram.</p> <p>g. 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015</p> <p>h. Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatangnya, tanggal 19 Desember 2014. Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.</p> <p>i. 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010</p> <p>j. Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli). Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.</p> <p>k. Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. Labeddu/ (Abdul Rauf Alias Raupong). Dikembalikan kepada Kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)</p> <p>4. Membebaskan agar Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu</p>	<p>Nomor : 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009. Dikembalikan Kepada Agusram.</p> <p>g. 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015</p> <p>h. Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatangnya, tanggal 19 Desember 2014. Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.</p> <p>i. 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.</p> <p>j. Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli). Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.</p> <p>k. Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. Labeddu/ (Abdul Rauf Alias Raupong). Dikembalikan kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				rupiah).		
4.	No.313/Pid. B/2015/PN-Stb	Watson Tarigan	<p>Kesatu : Pasal 385 ayat 1 (satu) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 (satu)</p> <p>Kedua : Pasal 263 ayat 2 (dua) KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 266 ayat 2 (dua) KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Watson Tarigan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Watson Tarigan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti:</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kompensasi atas penyerahan asli surat keputusan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Watson Tarigan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 385 ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dakwaan Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Watson Tarigan dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. .</p> <p>3. .Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti:</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kompensasi atas penyerahan asli surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/ Tahun 1991 an. Bertus</p>	Incrach

				<p>Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. Bertus Samosir sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal - Oktober.</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat tanggal - Oktober 2011.</p> <p>c. 1 (satu) lembar asli surat Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. Bertus Samosir, tanggal 20 Januari 1992.</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000.</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Rajiman Silalahi.</p> <p>e. 1 (satu) eksemplar asli surat pemerahan dengan ganti rugi Nomor: 593. / SK/2013 tanggal- untuk dan atas nama Suyadi Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dengan lampiran :</p> <p>f. 1 (satu) lembar asli surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi tanggal 25 September 2013 dari Jantianus Sinaga Kepada Suyadi.</p>	<p>Samosir sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal - Oktober.</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat tanggal - Oktober 2011.</p> <p>c. 1 (satu) lembar asli surat Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. Bertus Samosir, tanggal 20 Januari 1992.</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000.</p> <p>e. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rajiman Silalahi</p> <p>f. 1 (satu) eksemplar asli surat pemerahan dengan ganti rugi Nomor: 593. / SK/2013 tanggal- untuk dan atas nama Suyadi Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dengan lampiran</p> <p>g. 1 (satu) lembar asli surat pelepasan dan penyerahan</p>	
--	--	--	--	---	--	--

			<p>g. 1 (satu) lembar asli sketsa bentuk gambar tanggal 21 September 2013.</p> <p>h. 1 (satu) lembar asli berita acara pengukuran tanah Dusun tanggal 21 September 2013.</p> <p>i. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan tanah bidak tanah (Sporadik) atas nama Jantianus Sinaga tanggal 23 September 2013. Dikembalikan kepada Suyadi.</p> <p>j. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah Jantianus Sinaga yang terletak di Dusun P. Nauli Desa Bukit Mas seluas 2 hektar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2013 antara Suyadi dengan Watson Tarigan.</p> <p>k. 1 (satu) Lembar asli kwitansi pembayaran tanah Jantianus Sinaga yang terletak di P. Nauli (+ 2 Ha) yang dititipkan Suyadi untuk diserahkan kepada Jantianus Sinaga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2013 antara Watson Tarigan Dengan Jantianus Sinaga. Dikembalikan kepada Watson Tarigan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar</p>	<p>dengan ganti rugi tanggal 25 September 2013 dari Jantianus Sinaga Kepada Suyadi.</p> <p>h. 1 (satu) lembar asli sketsa bentuk gambar tanggal 21 September 2013.</p> <p>i. 1 (satu) lembar asli berita acara pengukuran tanah Dusun tanggal 21 September 2013.</p> <p>j. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan tanah bidak tanah (Sporadik) atas nama Jantianus Sinaga tanggal 23 September 2013. Dikembalikan kepada Suyadi</p> <p>k. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah Jantianus Sinaga yang terletak di Dusun P. Nauli Desa Bukit Mas seluas 2 hektar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2013 antara Suyadi dengan Watson Tarigan.</p> <p>l. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah Jantianus Sinaga yang terletak di P. Nauli (+ 2 Ha) yang dititipkan Suyadi</p>	
--	--	--	--	--	--

				biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah.	untuk diserahkan kepada Jantianus Sinaga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2013 antara Watson Tarigan Dengan Jantianus Sinaga. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.	
5.	No.687/Pid. B/2016/PN. STB	Ansari Alias Sori	Pasal 263 ayat 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ansari Alias Sori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ansari Alias Sori dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ansari Alias Sori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) eksemplar asli surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 590-110/AKTA/VII/2014 tertanggal 	Incrach

				<p>selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti:</p> <p>a. 1 (satu) eksemplar asli surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 590-110/AKTA/VII/2014 tertanggal 07 Juli 2014 An. Yanto : Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	<p>07 Juli 2014 An. Yanto : Dikembalikan kepada saksi Yanto.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, judul serta tabel putusan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya di dalam hukum pidana dalam hal Untuk mengetahui faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikat tanah.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui Hukum Pidana dalam Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul: “Deskripsi Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah”. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, penulis dapat menemukan penelitian terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh penulis sekarang, antara lain:

1. Nama : Yonathan D. Palinggi
NIM : 17310117
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Peranan Ilmu Forensik Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

- Rumusan Masalah : Bagaimana peranan ilmu forensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat?
2. Nama : Adi Kurniawan Tabitu Mauhogga
- NIM : 16312366
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Pengadilan
- Rumusan Masalah : Bagaimana modus operandi tindak pidana pemalsuan surat?
3. Nama : Alexander Nalle
- NIM : 17312657
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Disparitas Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?
4. Nama : Jhon Daniel Samur Waru
- NIM : 15310060
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Kajian Yuridis Penjatuhan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu

Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana menggunakan akta otentik palsu?
5. Nama : Oscar Herison Mangi
- NIM : 19310247
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Hak Milik Tanah
- Rumusan Masalah : a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah?
b. Bagaimanakah bentuk terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah?
c. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana penyerobotan tanah?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat

hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent Variable*).⁴ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini faktor penyebab, bentuk tindak

² H. Iahaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),” Bandung, Alfabeta. hlm. 66

³ Ibid. hlm. 66

⁴ Ibid. hlm. 64

pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas (*Independent Variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data yang akan diperoleh melalui bahan pustaka yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Depok, Rajawali Pers. hlm.12

- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan:

- a) Nomor: 16 / Pid.B / 2021 / PN.Srl.
- b) Nomor: 50 /Pid.B/2021/PN.Pal.
- c) Nomor: 61/PID.B/2023/PN.Pal.
- d) Nomor: 313 / Pid.B / 2015/ PN. Stb.
- e) Nomor: 687 / Pid.B /2016 / PN.Stb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan hasil penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa, analisis deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis atau memberikan penggambaran tentang data, yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yaitu faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.⁶

⁶ H. Iahaq, Op.Cit. h. 69-70